

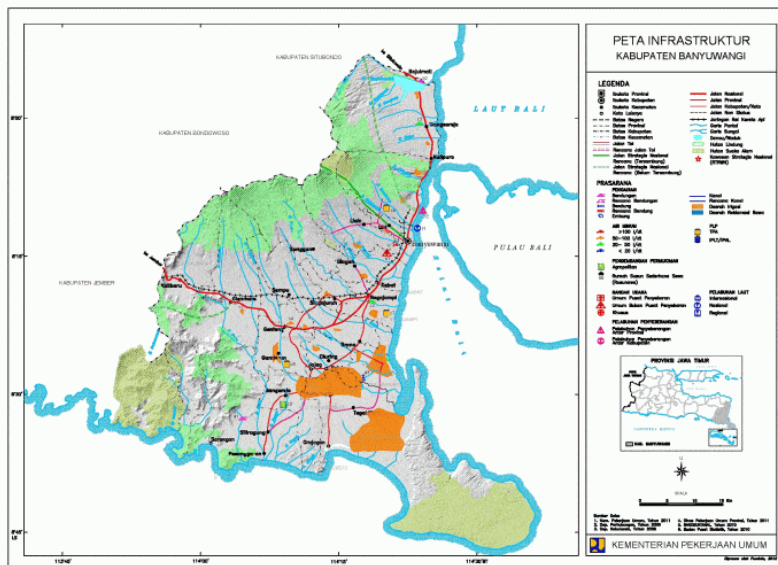
## BAB III

### DESKRIPSI WILAYAH

#### 3.1 Kondisi Umum Kabupaten Banyuwangi

##### 3.1.1 Kondisi geografis

Kabupaten Banyuwangi berlokasi paling timur Pulau Jawa dan membentang seluas 5.782,5 km<sup>2</sup> dan menjadikannya sebagai wilayah terluas di provinsi tersebut. Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7° 43'- 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53'-114° 38' Bujur Timur, menurut astronomi. Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak di titik paling timur Pulau Jawa, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut: Timur: Selat Bali; Utara: Kabupaten Situbondo. Samudra Hindia di selatan; Kabupaten Bondowoso dan Jember di barat.



Gambar 3. 1 Peta wilayah Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2020

##### i. Topografi Kabupaten Banyuwangi

Sebagian besar wilayah selatan berupa dataran rendah, sedangkan wilayah barat dan utara sering berbukit. Wilayah utara dan barat memiliki kemiringan

rata-rata 40° dan menerima curah hujan lebih banyak daripada wilayah lain di wilayah tersebut. Sebagian besar tanah datar memiliki kemiringan kurang dari 15°, dan terdapat cukup hujan rata-rata untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dataran rendah selatan mengalir ke dataran rendah utara, tempat beberapa sungai mengalir terus menerus. Ada 35 DAS yang terdaftar di Kabupaten Banyumas, yang menawarkan manfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah selain memungkinkan irigasi area persawahan yang cukup luas.

Kabupaten Banyumas tidak hanya menjanjikan di bidang pertanian, tetapi juga perkebunan dan kehutanan. Kabupaten ini juga berpotensi dalam rangka pengembangan yang diarahkan pada sektor peternakan sebagai media perekonomian penduduk setempat. Dalam jangka panjang, peningkatan atas kapabilitas alam dari sektor maritim diperoleh dengan cara inisiatif untuk mengintensifkan serta mendiversifikasi tata kelola wilayah pesisir maupun perairan laut jika memiliki garis pantai yang cukup panjang.

### 3.1.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah administratif yang terdiri atas sejumlah bagian beserta dengan turunannya yang akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

*Tabel 3. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi*

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Blimbingsari	10	0	14	Genteng	5	0
2	Wongsorejo	12	0	15	Kalibaru	6	0
3	Kalipuro	5	4	16	Glenmor	7	0
4	Giri	2	4	17	Tegalsari	6	0
5	Banyuwangi	0	18	18	Gambiran	6	0
6	Licin	8	0	19	Cluring	9	0
7	Glagah	8	2	20	Muncar	10	0
8	Songgon	9	0	21	Tegaldlimo	9	0

9	Sempu	7	0	22	Purwoharjo	8	0
10	Singojuruh	11	0	23	Bangorejo	7	0
11	Kabat	14	0	24	Siliragung	5	0
12	Rogojampi	10	0	25	Pesanggaran	5	0
13	Srono	10	0		Jumlah	189	28

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah administrasi 5.782,50 km<sup>2</sup> pada tahun 2020 mampu menampung 1,7 juta jiwa yang sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan usia produktif. Kecamatan Muncar yang menempati 2,52% dari total wilayah Kabupaten Banyumas dan dihuni oleh 136.425 jiwa atau 7,98% dari total penduduk kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terpadat.

### **3.2 Gambaran Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi**

#### **3.2.1 Profil Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi**

Potensi perikanan di Kabupaten Banyuwangi meliputi Selat Bali seluas 960 mil persegi, yang memiliki tempat pendaratan ikan di Muncar, Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabar, Blimbingsari, Rogojampi, Tegaldimo, Pesanggaran, dan Siliragung. Ikan yang dominan di daerah tersebut adalah ikan lemuru dengan dominasi mencapai 80% dari seluruh hasil perikanan diperoleh setiap tahunnya. Selain itu, perairan Indonesia yang meliputi Purwoharjo dan Pesanggaran memiliki ikan dasar demersal yang dominan, selain ikan pelangi, yang membantu nelayan dalam pendaratan dan pemasaran hasil tangkapannya. Kabupaten Banyumas memiliki 324 sungai dengan panjang total mencapai 735 km, waduk dan rawa seluas 6,0 ha yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sektor lainnya. Potensi perairan tersebut tersebar di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Genteng, Sempu, Tegalsari, Bangorejo, Songgon dan lain-lain.

Potensi budidayanya bahkan lebih besar dari perikanan tangkap; contohnya adalah budidaya laut, yang dapat menghasilkan lobster, kerapu, dan tiram mutiara; budidaya air payau, yang dapat menghasilkan udang vannamei,

kerapu, kepiting, dan makanan laut lainnya; dan budidaya air tawar, yang dapat menghasilkan komunitas ikan lele, koi tombro, tawes, dan makanan laut lainnya. Untuk memenuhi permintaan benih ikan air tawar, ada juga pusat benih ikan, yang dikenal dengan nama BBI KABAT DAN BBI GENTENG. Selain dijual mentah, ikan dari perairan umum dan akuakultur diolah atau ditukar menjadi berbagai produk seperti tepung ikan, pengalengan, pemindahan, dan penggaraman.

### **3.3 Tujuan dinas perikanan Kab. Banyuwangi**

1. Memanfaatkan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Memperluas ketersediaan dan penyaluran pangan komoditas perikanan untuk meningkatkan standar konsumsi gizi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sektor usaha pertanian perikanan yang tangguh dan terus berkembang.
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan inisiatif pembangunan pangan dan perikanan guna mediator dalam suksesi *good governance*, transparan, dan efisien.

### **3.4 Visi dan Misi Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi**

a. VISI:

“Terwujudnya usaha perikanan yang maju dan lestari untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat”

b. MISI:

1. Pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan dan lestari
2. Mewujudkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing dan bermutu tinggi
3. Membentuk masyarakat yang mampu membudidayakan perikanan dengan tangguh serta berkembang
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha perikanan dan industri pangan dalam memanfaatkan sumber daya manusia
5. Menyadari bahwa bidang pembangunan pangan dan perikanan telah memiliki sistem pelayanan publik yang efektif.

### **3.5 Bidang Usaha Dinas Perikanan kab. Banyuwangi**

#### **3.5.1 Bidang Perikanan Budidaya**

1. Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya
2. Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas :
  - Merumuskan regulasi yang dimaksudkan sebagai upaya perbaikan mutu beserta kapasitas sarpras akuakultur, indukan unggul beserta benih dan juga pembudidayaan sejumlah ikan, pemutahiran hasil akuakultur, implementasi teknologi akuakultur, dan sejumlah aspek lainnya;
  - Menyusun regulasi penyelenggaraan prasarana dan sarana yang akan meningkatkan kapasitas dan mutu akuakultur; peningkatan mutu induk unggul dan benih; peningkatan produksi perikanan; pemanfaatan teknologi akuakultur; dan sejumlah aspek lainnya.;
  - Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka pengembangan prasarana dan sarana akuakultur yang lebih baik, optimalisasi kualitas indukan beserta benihnya dan juga budidaya sejumlah perikanan, optimalisasi hasil akuakultur, implementasi teknologi akuakultur, dan sejumlah aspek lainnya;
  - Bersiap memberikan saran teknis serta pengawasan dalam aspek optimalisasi kapabilitas maupun sarpras akuakultur, optimalisasi kapabilitas indukan beserta anakan dari sejumlah perikanan, pertumbuhan hasil akuakultur, implementasi teknologi akuakultur, dan sejumlah aspek lainnya.
  - Pengorganisasian, implementasi, serta pelaporan penilaian dan laporan mengenai kesehatan ikan beserta pengelolaan ekologi, pasokan konsumsi perikanan, dukungan terhadap bisnis akuakultur, peningkatan standar indukan beserta anakan dari sejumlah ikan, dan perbaikan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas akuakultur

### **3.5.2 Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang berkewajiban dalam penyelenggaraan implementasi beserta eksekusi dari regulasi mengenai tatakelola program memberdayakan para nelayan melalui sektor budidaya perikanan tangkap dengan sejumlah fungsi lanjutan, sebagai berikut:

- Menyusun ketentuan dalam sektor tata kelola sumber daya, optimalisasi kegiatan perikanan tangkap, tata kelola dari TPI beserta PPI, serta sejumlah tugas yang dikhususkan dalam upaya memberdayakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan;
- Menyusun kebijakan implementasi operasional TPI/PPI, optimalisasi kegiatan usaha ikan tangkap, serta upaya lainnya dengan tujuan membuat masyarakat yang berkecukupan sebagai nelayan lebih berdaya
- Menyusun pedoman, standar, praktik, dan norma tata kelola budidaya perikanan, optimalisasi kegiatan budidaya perikanan tangkap, tata kelola operasional TPI/PPI, upaya memberdayakan nelayan melalui bimbingan teknis beserta adanya supervisi yang kompeten dalam bidang tata kelola budidaya perikanan
- Bersiap untuk melaksanakan penilaian dan pelaporan di bidang pengelolaan TPI/PPI, meningkatkan kegiatan penangkapan ikan, dan memberdayakan masyarakat nelayan kecil untuk pengelolaan sumber daya ikan.

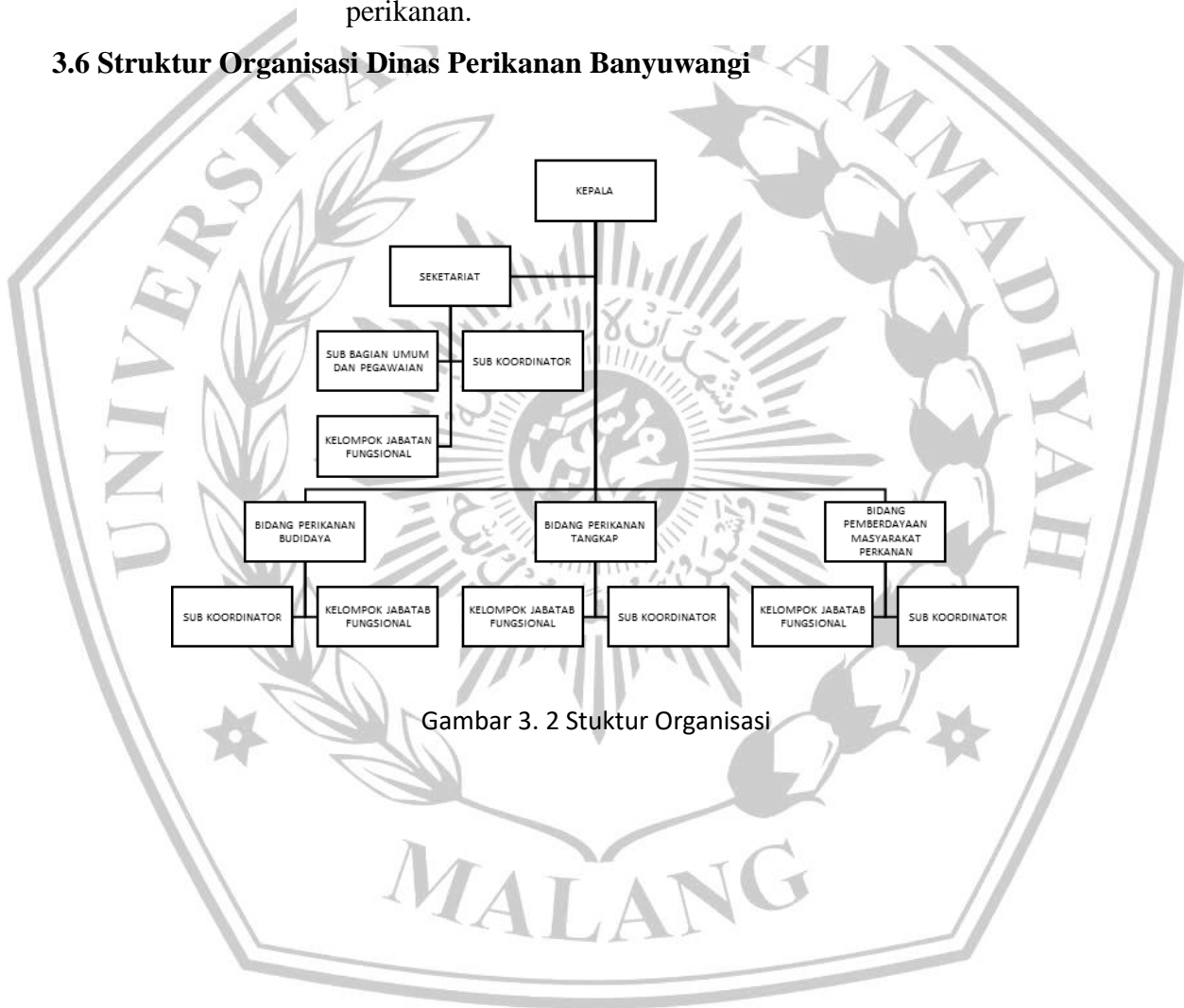
### **3.5.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan**

Bidang ini berkewajiban untuk menyelenggarakan implementasi beserta eksekusi dari regulasi mengenai kewajiban instansi dalam memberdayakan para nelayan melalui sektor perikanan. Adapun fungsi lebih lanjut dirincikan sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan di bidang teknis pemberdayaan organisasi pengolahan dan pemasaran perikanan skala kecil
- Menyusun kebijakan di bidang teknis seperti pemasaran kelompok usaha dan pemberdayaan pengelolaan produk di industri perikanan;

- Menyusun pedoman, standar, praktik, dan norma di bidang teknis pemberdayaan organisasi skala kecil yang mengolah dan memasarkan hasil perikanan;
- Menyusun pedoman teknis dan pengawasan di bidang kelompok usaha yang terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Menyusun penilaian dan laporan pelaksanaan di bidang teknis pemberdayaan organisasi yang mengolah dan memasarkan hasil perikanan.

### 3.6 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Banyuwangi



Gambar 3. 2 Stuktur Organisasi